MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU: ANALISIS ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI

Elma Sintia[1], Ridha Ahida[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
[1]elmasintia7@gmail.com, [2]ridhaahida@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

Islamic Education Management (MPI) is not only concerned with the process of managing educational institutions but also reflects the values and philosophical perspectives that underpin every managerial decision. In practice, the management of Islamic educational institutions faces challenges in integrating the principles of Islamic teachings with developments in modern management theory and practice. This study aims to analyze the ontological, epistemological, and axiological foundations of Islamic Education Management and to examine the interrelationship among these three in developing a framework for managing Islamic educational institutions. This study employs a qualitative approach using library research. Data were obtained through a review of books on the philosophy of science, literature on Islamic Educational Management, scientific journal articles, and normative sources such as the Qur'an and hadith. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method through the identification, examination, and synthesis of the three dimensions of the philosophy of science. The results indicate that, ontologically, Islamic Educational Management (IEM) views human beings, institutions, resources, and the curriculum as trusts whose management is oriented toward the development of civilized individuals and the common good. Epistemologically, managerial knowledge is constructed through the integration of revelation, reason, experience, and intuition, realized through rational, intuitive, dialogical, comparative, critical, and consultative methods. Meanwhile, axiologically, MPI is grounded in the values of tawhid, amanah, justice, ihsan, and the common good as ethical orientations in decision-making. This study concludes that these three dimensions form an inseparable, unified paradigm in the management of Islamic education. The integration of ontology, epistemology, and axiology serves as both a conceptual foundation and a practical guideline for realizing effective, integrity-driven governance of Islamic educational institutions that is oriented toward Islamic values.

Keywords: *Islamic education management, philosophy of science, ontology, epistemology, axiology*

ABSTRAK

Manajemen Pendidikan Islam (MPI) tidak hanya berkaitan dengan proses pengelolaan lembaga pendidikan, tetapi juga mencerminkan landasan nilai dan pandangan filosofis yang mendasari setiap keputusan manajerial. Dalam praktiknya, pengelolaan lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan perkembangan teori dan praktik manajemen modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Manajemen Pendidikan Islam serta mengkaji keterkaitan ketiganya dalam membangun kerangka pengelolaan

lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan buku-buku filsafat ilmu, literatur Manajemen Pendidikan Islam, artikel jurnal ilmiah, serta sumber normatif berupa Al-Qur'an dan hadis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui identifikasi, penelaahan, dan sintesis terhadap ketiga dimensi filsafat ilmu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis, MPI memandang manusia, kelembagaan, sumber daya, dan kurikulum sebagai amanah yang pengelolaannya berorientasi pada pembentukan manusia beradab dan kemaslahatan. Secara epistemologis, pengetahuan manajerial dibangun melalui integrasi wahyu, akal, pengalaman, dan intuisi yang diwujudkan melalui metode rasional, intuitif, dialogis, komparatif, kritik, serta musyawarah. Sementara itu, secara aksiologis, MPI berlandaskan nilai tauhid, amanah, keadilan, ihsan, dan kemaslahatan sebagai orientasi etis dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga dimensi tersebut membentuk satu kesatuan paradigma yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan pendidikan Islam. Integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi landasan konseptual sekaligus pedoman praktis dalam mewujudkan tata kelola lembaga pendidikan Islam yang efektif, berintegritas, dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan Islam, Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi

A. Pendahuluan

Setiap masyarakat membangun sistem pendidikan menurut cara ia memandang dunia, manusia, dan tujuan hidup. Karena itu, pendidikan tidak pernah benar-benar netral. Di balik jadwal pelajaran, struktur organisasi, dan laporan keuangan sebuah lembaga, selalu ada anggapan tentang apa yang bernilai dan untuk apa ilmu dicari. Dalam konteks modern, anggapan-anggapan itu sering tidak dibicarakan terbuka, sehingga lembaga pendidikan mudah terseret pada ukuran keberhasilan yang sempit. Persoalan serupa menjadi nyata ketika ilmu dipisah dari nilai dan pendidikan agama dipisah dari pendidikan umum (Muhaimin, 2009).

Di tengah kegelisahan itu, pendidikan Islam layak ditelaah lebih dekat. Di Indonesia Pendidikan Islam tumbuh dalam beragam bentuk, mulai dari madrasah diniyah, pesantren, madrasah formal, sampai perguruan tinggi keagamaan Islam. Keragaman itu menghadirkan kebutuhan yang tidak bisa ditawar, yakni pengelolaan yang tertib supaya sumber daya yang terbatas dapat diarahkan pada tujuan lembaga. Pada titik inilah Manajemen Pendidikan Islam (MPI) mengambil peran. Qomar (2007) menempatkan MPI sebagai upaya mengelola

lembaga pendidikan Islam secara terencana dan strategis, dengan memanfaatkan kerangka ilmu manajemen sekaligus tetap berpijak pada ajaran Islam.

Meskipun demikian, praktik di lapangan tidak selalu semulus rumusannya. Lembaga pendidikan Islam berada di antara dua tarikan. Satu sisi menuntut agar identitas keislaman yang bersumber dari nilai transendental dipertahankan. Sisi lain mendesak agar standar manajemen modern, yang sering dianggap bebas nilai, segera diadopsi. Ketegangan ini bukan hanya soal teknik, melainkan menyentuh pertanyaan filosofis yang paling dasar tentang hakikat yang dikelola, cara mengetahuinya, dan tujuan akhirnya. Menurut hemat penulis, selama pertanyaan tersebut dibiarkan menggantung, pembaruan manajemen hanya akan menjadi tambal sulam.

Filsafat ilmu menyediakan alat untuk membedah persoalan tersebut. Suriasumantri (2013) merumuskan tiga pertanyaan pokok yang menandai landasan setiap ilmu. Ontologi bertanya tentang apa yang dikaji, epistemologi tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan aksiologi tentang untuk apa pengetahuan itu digunakan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengaitkan filsafat ilmu dengan pengembangan teori MPI seperti (Amarullah dkk., 2023 dan Muiz dkk., 2024). Tisnawati dkk. (2024) bahkan menunjukkan bahwa landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi memperkuat fungsi perencanaan sampai pengendalian dalam MPI. Meski begitu, sebagian pembahasan masih ringkas dan belum banyak menunjukkan bagaimana ketiga cabang tersebut bertaut dalam keputusan manajerial sehari-hari.

Berdasarkan uraian itu, artikel ini bertujuan (1) menjelaskan landasan ontologis MPI, (2) menguraikan landasan epistemologisnya, (3) menelaah landasan aksiologisnya, dan (4) mensintesiskan ketiganya menjadi kerangka berpikir yang dapat dipakai untuk membaca sekaligus memperbaiki praktik pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*).

Pilihan itu diambil karena objek kajiannya berupa konsep dan gagasan filosofis, bukan perilaku yang diamati langsung di lapangan. Data primer berupa buku-buku filsafat ilmu dan karya yang secara khusus membahas ontology, epistemology, dan aksiologi serta manajemen pendidikan Islam. Data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan. Al-Qur'an dan hadis dipakai sebagai rujukan normatif pada bagian-bagian yang memerlukan landasan wahyu.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dalam empat tahap. Tahap pertama mengidentifikasi hakikat dan objek MPI pada dimensi ontologi. Tahap kedua menelaah sumber dan metode pemerolehan pengetahuan MPI pada dimensi epistemologi. Tahap ketiga menganalisis nilai dan tujuan MPI pada dimensi aksiologi. Tahap keempat menyintesiskan ketiganya, lalu menarik implikasi bagi praktik pengelolaan. Perlu dicatat bahwa penafsiran penulis pada tahap sintesis merupakan hasil penalaran terhadap sumber-sumber tersebut, bukan kutipan langsung dari salah satunya, dan bagian itu ditandai secara eksplisit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Landasan Ontologi Manajemen Pendidikan Islam

Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, *ontos* yang berarti yang ada dan *logos* yang berarti ilmu atau teori. Secara ringkas, ontologi ialah kajian tentang hakikat segala yang ada. Ontologi dipandang sebagai bagian dari metafisika, cabang filsafat yang menyelidiki kenyataan secara paling umum (Bakhtiar, 2012; Burhanuddin, 2018). Pratiwi dkk. (2024) menambahkan bahwa objek telaah ontologi tidak terikat pada satu bentuk wujud tertentu, melainkan berusaha menemukan inti yang dimuat oleh setiap kenyataan. Dalam kerangka ilmu, ontologi menetapkan wilayah yang dibicarakan sebuah disiplin, sehingga ia juga menentukan apa yang masuk dan apa yang tidak masuk dalam kajiannya (Suriasumantri, 2013).

Untuk MPI, pertanyaan ontologis yang muncul seperti: apa sesungguhnya yang sedang dikelola, dan apa kedudukan pengelolaan itu dalam pandangan Islam. Jawaban

atas pertanyaan tersebut membedakan MPI dari manajemen pendidikan pada umumnya. Manajemen pendidikan konvensional cenderung berpusat pada manusia (antroposentris), sebab perencana, pelaksana, sekaligus penerima manfaatnya adalah manusia. MPI memang melibatkan manusia secara penuh, tetapi menempatkan seluruh aktivitas itu dalam hubungan dengan Allah SWT. Manusia dipercaya sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah [2]: 30) dan setiap amanah yang dipikulnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه…

> Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin…".

Pandangan ini sejalan dengan kritik Al-Attas (1980) terhadap pendidikan yang kehilangan *adab*. Menurutnya, tujuan pendidikan dalam Islam ialah menghasilkan manusia yang baik, dan pengetahuan yang ditanamkan harus ditempatkan pada tempat yang semestinya. Gagasan ini membawa konsekuensi ontologis bagi manajemen. Lembaga pendidikan tidak cukup dipahami sebagai mesin layanan yang dinilai dari keluaran terukur. Ia adalah ruang pembentukan manusia, dan pengelolanya ikut bertanggung jawab atas kualitas pembentukan itu.

Dalam filsafat ilmu, kajian ontologis lazim dipilah menjadi objek material dan objek formal (Bakhtiar, 2012). Objek material MPI adalah seluruh realitas yang menjadi sasaran pengelolaan di lembaga pendidikan Islam, baik yang berwujud maupun tidak. Cakupannya lain:

a. Manusia, yaitu pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua atau masyarakat pendukung;
b. Kelembagaan, yaitu struktur organisasi, tata tertib, dan budaya lembaga;
c. Sumber daya fisik dan finansial, yaitu sarana prasarana, anggaran, dan wakaf atau dana umat bila ada;
d. Kurikulum, program, dan informasi yang mengalir di dalam lembaga.

Objek formal merupakan sudut pandang yang dipakai untuk membedah objek material tadi. Pada

MPI, sudut pandang itu setidaknya memuat tiga hal. *Pertama,* fungsi manajerial berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggerakan, dan pengawasan, yang diarahkan pada tercapainya tujuan pendidikan Islam (Qomar, 2007). *Kedua,* prinsip pengelolaan yang bersumber dari ajaran Islam, antara lain tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, dan keikhlasan. *Ketiga,* tujuan transendental, yakni bahwa pengelolaan tidak berhenti pada efisiensi dan efektivitas duniawi, tetapi diarahkan pada terbentuknya manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak, serta pada keridaan Allah SWT (Khaidir dkk., 2021).

Implikasi ontologi ini dapat dilihat pada perumusan kebijakan. Jika lembaga memahami dirinya sebagai pengemban amanah pembentukan manusia, maka kebijakan yang diambil perlu diuji dengan tujuan-tujuan pokok syariat (*maqasid al-shari'ah*), yang dalam rumusan klasik mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Auda (2008) bahkan mendorong pembacaan *maqasid* yang lebih luas dan sistemik, sehingga ia dapat dipakai sebagai kerangka menilai kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Kajian terbaru memperlihatkan arah serupa. Herdiana dkk. (2024) menghubungkan lima unsur *maqasid* dengan dimensi manajemen mutu seperti kurikulum, sumber daya manusia, budaya lembaga, dan layanan, sedangkan Rahmianti dan Dewi (2026) menempatkannya sebagai landasan etis sekaligus panduan praktis dari perencanaan sampai evaluasi dalam manajemen pendidikan inklusif. Dengan cara ini, ukuran keberhasilan tidak jatuh pada capaian akademik semata, melainkan juga pada kemaslahatan peserta didik dan masyarakat.

2. Landasan Epistemologi Manajemen Pendidikan Islam

Setelah hakikat (ontologi), soal berikutnya adalah cara mengetahuinya. Epistemologi berasal dari kata Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti teori atau ilmu. Cabang ini membahas hakikat, sumber, dan batas pengetahuan, serta cara menguji kebenarannya (Bakhtiar, 2012; Rokhmah, 2021). Suriasumantri (2013)

menyederhanakannya sebagai pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, yang di dalam ilmu dijawab oleh metode ilmiah. Tafsir (2012) mencatat tiga jalur klasik pengetahuan manusia, yakni pengalaman indrawi, rasio, dan intuisi, lalu menambahkan bahwa dalam Islam wahyu menempati kedudukan yang tidak dapat disamakan dengan ketiganya.

Al-Qur'an sendiri memberi isyarat tentang perangkat mengetahui. Manusia dikaruniai pendengaran, penglihatan, dan hati (QS. An-Nahl [16]: 78), dan ketiganya akan dimintai pertanggungjawaban (QS. Al-Isra' [17]: 36). Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa pengetahuan dalam Islam tidak dibatasi pada data empiris dan juga tidak membuang data empiris. Pengalaman, akal, hati, dan wahyu ditempatkan dalam satu bangunan yang saling menguatkan.

Rumusan epistemologis yang berpengaruh di lingkungan kajian Islam di Indonesia ialah pembedaan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Abdullah (2006) memakainya untuk menawarkan pendekatan integratif-interkonektif, yaitu usaha menghubungkan teks keagamaan, penalaran dan data ilmiah, serta pengalaman batin, alih-alih mempertentangkannya. Bagi MPI, pendekatan ini menolong menjawab dilema yang diuraikan di awal. Teks wahyu memberi arah nilai, penalaran dan data memberi ketepatan teknis, sedangkan kepekaan batin menjaga agar keputusan tidak kehilangan nurani. Rizki dan Rijal (2026) sampai pada kesimpulan senada, yakni bahwa ketiga epistemologi itu saling melengkapi dan dapat dirangkai menjadi kerangka terpadu yang menjembatani wahyu, akal, dan spiritualitas.

Qomar (2005) menawarkan lima metode membangun pengetahuan pendidikan Islam, yaitu rasional, intuitif, dialogis, komparatif, dan kritik. Kelimanya diringkas pada Tabel 1, dengan kolom terakhir memuat contoh penerapan dalam manajemen lembaga. Kolom penerapan tersebut merupakan penafsiran penulis dan tidak berasal dari Qomar.

Tabel 1. Lima Metode Membangun Pengetahuan Pendidikan Islam dan Penerapannya dalam MPI

No	Metode	Inti metode (Qomar, 2005)	Contoh penerapan
1	Rasional (*'aqli*)	Memakai pertimbang	Menyusun teori dan

		an akal dan kriteria kebenaran yang logis untuk memahami serta menguji gagasan.	model tata kelola, menguji konsistensi kebijakan, mengkaji ulang teori manajemen yang berasal dari Barat.
2	Intuitif (*dzawqi*)	Mengandalkan kepekaan hati, ilham, dan perenungan untuk menangkap kebenaran yang tidak sepenuhnya terjangkau akal dan indra.	Kepekaan pimpinan membaca suasana batin guru dan peserta didik, serta pertimbangan moral dalam situasi yang tidak diatur prosedur.
3	Dialogis (*jadali*)	Menggali pengetahuan lewat diskusi dan perdebatan ilmiah yang argumentatif.	Rapat musyawarah, forum evaluasi bersama, dan diskusi kurikulum yang melibatkan pendidik, pimpinan, dan pemangku kepentingan.
4	Komparatif (*muqaran*)	Membandingkan dua objek atau lebih untuk menemukan keunggulan dan memperjelas permasalahan.	Studi banding antarlembaga, perbandingan praktik masa lalu dan sekarang, serta penilaian terhadap model manajemen dari tradisi yang berbeda.
5	Kritik (*naqdi*)	Mengoreksi kelemahan atau kekeliruan suatu konsep atau praktik secara konstruktif disertai tawaran alternatif.	Evaluasi program, supervisi, audit mutu, dan penelitian tindakan untuk memperbaiki praktik yang kurang tepat.

Kelima metode itu lebih tepat dibaca sebagai paket yang saling melengkapi daripada pilihan yang harus diambil salah satu. Penalaran rasional tanpa kepekaan batin mudah menjadi kering. Intuisi tanpa dialog dan kritik rawan subjektif. Perbandingan tanpa landasan nilai bisa berujung pada meniru buta. Di sini penulis melihat kekuatan epistemologi MPI, yakni kesediaan untuk memakai banyak pintu masuk sambil tetap menjaga kerangka normatifnya.

Satu praktik epistemik yang khas perlu disebut tersendiri, yaitu musyawarah. Al-Qur'an memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan bersama (QS. Ali 'Imran [3]: 159) dan menyebut musyawarah sebagai ciri orang beriman (QS. Asy-Syura [42]: 38). Dalam konteks lembaga pendidikan, musyawarah bukan sekadar formalitas pengambilan keputusan.

Melainkan cara mengumpulkan pengetahuan yang tersebar pada banyak orang, lalu memadukannya menjadi keputusan yang lebih bijak. Kajian kepustakaan Fauziah dan Thohir (2025) melaporkan bahwa *syura* dapat meningkatkan legitimasi keputusan, mendorong partisipasi, dan melahirkan kebijakan yang lebih inklusif, meski penolakan terhadap perubahan dalam birokrasi yang mapan masih menjadi hambatan. Saputri dkk. (2024) menambahkan bahwa jenis masalah perlu dikenali lebih dulu agar pimpinan dapat memilih pendekatan pengambilan keputusan yang tepat. Sementara itu hikmah (QS. Al-Baqarah [2]: 269) dapat dipahami sebagai mutu pertimbangan yang menjaga agar pengetahuan dipakai pada tempat dan waktu yang tepat.

Terakhir, epistemologi MPI harus menghadapi persoalan dikotomi ilmu. Muhaimin (2009) menunjukkan bahwa pemisahan ilmu agama dan ilmu umum telah lama membebani pendidikan Islam, dan ia mengusulkan rekonstruksi yang menyatukan keduanya. Dalam bidang manajemen, konsekuensinya jelas. Teori perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dari ilmu manajemen modern tidak perlu ditolak. Teori itu dapat diterima sebagai ilmu yang berguna selama ditempatkan di bawah nilai dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Landasan Aksiologi Manajemen Pendidikan Islam

Aksiologi membahas untuk apa semua pengetahuan itu dipakai. Aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang berarti nilai dan *logos* yang berarti teori. Ia dipahami sebagai teori tentang nilai, termasuk nilai guna pengetahuan (Burhanuddin, 2018; Suriasumantri, 2013). Bakhtiar (2012) menyebut bahwa cakupan aksiologi meliputi etika dan estetika. Pada konteks manajemen, sisi etika jelas lebih dominan, karena ia berkenaan dengan baik dan buruk, benar dan salah, serta halal dan haram dalam menggunakan ilmu dan wewenang. Suriasumantri (2013) juga menegaskan bahwa ilmu tidak boleh lepas dari pertimbangan moral, sebab ilmu yang berkembang tanpa kendali nilai dapat menjauh dari kepentingan manusia.

Nilai-nilai dasar MPI dapat dirangkum dalam beberapa poin

berikut. Rangkuman ini disusun berdasarkan sumber-sumber wahyu dan literatur yang dirujuk, bukan daftar baku yang berasal dari satu pengarang.

a. Tauhid dan ibadah**.** Seluruh aktivitas pengelolaan dipandang sebagai bagian d
b. ari pengabdian kepada Allah SWT. Rapat, penganggaran, dan penilaian kinerja pun mempunyai dimensi ibadah bila dijalankan dengan niat yang lurus.
c. Amanah**.** Jabatan dan sumber daya adalah titipan. Al-Qur'an memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak (QS. An-Nisa' [4]: 58), dan hadis tentang tanggung jawab setiap pemimpin memperkuat pesan ini.
d. Keadilan ('adl). Keadilan berarti memperlakukan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik secara proporsional, termasuk dalam penerimaan, penilaian, pembagian beban kerja, dan kesejahteraan (QS. An-Nahl [16]: 90).
e. Ihsan. Bekerja dengan mutu terbaik, seakan-akan diawasi Allah SWT. Nilai ini menjadi dasar etos mutu yang tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengawas.
f. Musyawarah dan kasih sayang. Hubungan kerja dibangun dengan keterbukaan dan kelembutan, sebagaimana tersirat dalam QS. Ali 'Imran [3]: 159.
g. Kemaslahatan dan orientasi jangka panjang**.** Keberhasilan diukur dari manfaat bagi peserta didik dan masyarakat, di dunia maupun akhirat, dan karenanya keputusan dilihat dampaknya jauh ke depan (Auda, 2008).

Keenam nilai itu masih terasa umum. Agar arah sosialnya lebih tajam, Kuntowijoyo (2004), menawarkan gagasan ilmu sosial profetik dengan tiga muatan, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, yang berpangkal pada QS. Ali 'Imran [3]: 110. Meski gagasan itu pada mulanya ditujukan bagi ilmu sosial, tetapi bisa dipinjam untuk menafsirkan nilai profetik dalam MPI. Humanisasi tampak pada pengelolaan yang memuliakan manusia. Liberasi tampak pada upaya membebaskan peserta didik dan pendidik dari kebodohan, ketimpangan, dan ketergantungan.

Transendensi tampak pada penegasan bahwa semua itu bersumber dari iman. Penerapan ini adalah penafsiran penulis dan perlu dikaji lebih jauh dalam penelitian lanjutan.

Nilai-nilai tersebut membuat MPI berbeda dari sistem yang menjadikan keberhasilan akademik dan ekonomi sebagai ukuran utama. Dalam MPI, kemajuan lembaga tetap penting, tetapi ia tidak boleh dibayar dengan ketidakadilan atau dengan hilangnya adab. Al-Attas (1980) menekankan bahwa pengetahuan tanpa adab justru menimbulkan kekacauan. Di lapangan, indikator keberhasilan lembaga semestinya tidak berhenti pada nilai ujian, melainkan mencakup pembentukan karakter, keadilan layanan, dan kebermanfaatan lulusan bagi masyarakat.

4. Sintesis dan Implikasi bagi Praktik Pengelolaan

Ketiga landasan di atas tidak berdiri sendiri. Ontologi menentukan apa yang dikelola dan mengapa. Epistemologi menentukan bagaimana pengetahuan tentang pengelolaan itu dibangun dan diuji. Aksiologi menentukan untuk apa semuanya digunakan dan dengan nilai apa dinilai. Bila salah satu dilepas, bangunan menjadi pincang. Ontologi tanpa aksiologi menghasilkan wacana yang tinggi tetapi tidak menyentuh praktik. Epistemologi tanpa ontologi menghasilkan metode yang canggih tetapi tidak tahu arah. Aksiologi tanpa epistemologi menghasilkan nasihat moral yang tidak ditopang pengetahuan teknis. Tabel 2 meringkas keterkaitan itu beserta implikasinya.

Tabel 2. Sintesis Landasan Filsafat Ilmu dalam MPI dan Implikasinya

Dimensi & Pertanyaan pokok	Jawaban MPI	Implikasi praktis
Ontologi: Apa yang dikelola dan apa hakikatnya?	Manusia, lembaga, sumber daya, dan kurikulum dikelola sebagai amanah khalifah dengan orientasi teo-antroposentris.	Visi, misi, dan kebijakan diuji dengan tujuan pembentukan manusia beradab dan *maqasid syariah.*
Epistemologi:Bagaimana pengetahuan manajerial diperoleh dan diuji?	Wahyu, akal, pengalaman, dan intuisi melalui metode rasional, intuitif, dialogis, komparatif, kritik, dan musyawarah.	Keputusan disusun dari data dan kajian, dimusyawarahkan, lalu dievaluasi secara kritis dan berkala.

Aksiologi: Untuk apa dan dengan nilai apa pengetahuan digunakan	Amanah, keadilan, ihsan, dan kemaslahatan sebagai ukuran baik dan buruk.	Indikator kinerja mencakup karakter, keadilan layanan, dan manfaat sosial, bukan hanya capaian akademik.

Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah madrasah yang hendak menyusun kebijakan penerimaan peserta didik baru. Pada tahap ontologis, pengelola menegaskan bahwa madrasah adalah ruang pembentukan manusia, bukan sekadar pemasok lulusan berprestasi, sehingga akses bagi kelompok kurang mampu patut dipertimbangkan. Pada tahap epistemologis, pengelola mengumpulkan data demografi, menimbang pengalaman lembaga lain, lalu bermusyawarah dengan dewan guru dan komite. Pada tahap aksiologis, keputusan akhir diperiksa dengan ukuran keadilan dan kemaslahatan.

Kajian ini memiliki keterbatasan. Karena berbasis kepustakaan, ia belum menguji kerangka tersebut pada lembaga nyata. Penelitian lanjutan dengan studi kasus atau survei di madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam diperlukan untuk melihat seberapa jauh ketiga landasan itu benar-benar tercermin dalam praktik, dan di mana celah antara rumusan dan kenyataan paling lebar.

D. Kesimpulan

Filsafat ilmu memberi fondasi yang kokoh bagi Manajemen Pendidikan Islam melalui tiga dimensinya. Secara ontologis, MPI mengelola manusia, lembaga, sumber daya, dan kurikulum sebagai amanah dengan corak teo-antroposentris, sehingga tujuannya melampaui efisiensi dan mengarah pada pembentukan manusia beradab serta kemaslahatan. Secara epistemologis, pengetahuan manajerial bersumber dari wahyu, akal, pengalaman, dan intuisi, dibangun melalui metode rasional, intuitif, dialogis, komparatif, dan kritik, serta dijalankan lewat musyawarah dan hikmah, dengan sikap terbuka terhadap ilmu manajemen modern selama selaras dengan nilai Islam. Secara aksiologis, MPI berpijak pada tauhid, amanah, keadilan, ihsan, dan kemaslahatan sebagai ukuran keberhasilan.

Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan membentuk paradigma

tata kelola yang normatif sekaligus operasional. Bagi pengelola lembaga, kerangka ini dapat dijadikan alat uji atas visi, keputusan, dan evaluasi. Bagi peneliti dapat membuka ruang untuk kajian empiris yang menguji kesesuaian antara landasan filosofis dan praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim. Bandung: PT Sygna Examedia Arkanleema

BUKU

Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Attas, S. M. N. (1980). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Bakhtiar, A. (2012). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Burhanuddin, N. (2018). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Khaidir, Tahrim, T., Purnomo, & Zaki, A. (2021). *Teori Filsafat Manajemen Pendidikan Islam*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Kuntowijoyo. (2004). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Jakarta: Teraju.

Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.

Qomar, M. (2005). *Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga.

Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.

Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Tafsir, A. (2012). *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal/ Artikel

Amarullah, M. S., Maulidi, A., Syarifudin, E., & Fauzi, A. (2023). Membangun Teori Manajemen Pendidikan Islam melalui Teori Filsafat Ilmu. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4607-4617. https://doi.org/10.31604/jips.v10i10.2023.4607-4617

Fauziah, H. A., & Thohir, M. (2025). Prinsip Syura dalam

Pengambilan Keputusan Kepemimpinan Birokrasi pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2710-2718. https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1301

Herdiana, F., Azis, M. A., & Fitri, A. (2024). Manajemen mutu terpadu berbasis maqashid syariah di lembaga pendidikan Islam. *Eduvis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 193-201.

Muiz, R. N., Rahman, Z. D., Sarmain, Fauzi, A., & Hidayat, W. (2024). Kedudukan Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Ilmu untuk Pengembangan Teori Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 86-91.

Pratiwi, U., Karneli, Y., & Marsidin, S. (2024). Pemahaman Mendasar tentang Hakekat Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, 2(2), 74-80. https://doi.org/10.38035/jpsn.v2i2.170

Rahmianti, S., & Dewi, R. R. V. K. (2026). Operasionalisasi Maqashid Al-Syariah dalam Manajemen Pendidikan Inklusif: Systematic Literature Review. *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa*, 4(4), 112-126. https://doi.org/10.61132/yudistira.v4i4.3081

Rizki, A., & Rijal, S. (2026). Epistemological Foundations of Islamic Education: Bayani, Burhani, and Irfani. *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 9(1), 1-14. https://doi.org/10.23971/mdr.v9i1.11002

Rokhmah, D. (2021). Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 172-186.

Saputri, E. N., Rahayu, S., & Andriani, T. (2024). Pengambilan Keputusan dalam Kajian Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4321-4330. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13046

Tisnawati, N., Noormawanti, Murtadlo, & Pahrudin, A. (2024). The Role of Philosophy in The Development of Islamic Education Management. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 9(1), 463-480.

Disclamer : Penulis menggunakan Claude AI, Chatgpt, dan Gemini untuk menyusun ulang tata bahasa, melengkapi tulisan dan referensi